

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini kebijakan yang pemerintah lakukan dalam bentuk intervensi di Kawasan Kota Lama Semarang. Intervensi pemerintah ini adalah proses menghidupkan kembali suatu daerah yang sebelumnya kurang terpelihara. Yang mana bahwa dalam rangka menghidupkan dan memfungsikan kembali kawasan Kota Lama Semarang dan untuk melindungi bangunan- bangunan kuno yang ada pada kawasan tersebut, serta meningkatkan kualitas tatanan lingkungan kawasan yang selaras, serasi dan seimbang, perlu mengarahkan segala bentuk kegiatan pembangunan pada kawasan Kota Lama Semarang.

Setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing salah satunya Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa kebijakan agar wilayah Kota Semarang menjadi lebih baik lagi, salah satu kebijakannya yaitu melakukan intervensi pada kawasan Kota Lama Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan kawasan yang signifikan untuk direvitalisasi agar terwujud tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yaitu Kehidupan Kota dan Komunitas yang tumbuh dan berjalan secara berkelanjutan. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Semarang yang menjadi kekayaan budaya dan aset wisata yang vital untuk dilestarikan dan dikembangkan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang adalah dengan pengembangan kawasan Kota Lama dalam rangka revitalisasi Kota Lama. Diharapkan dengan terlaksananya intervensi

tersebut merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya. Secara umum revitalisasi memiliki makna sebagai pengembalian kembali kawasan dengan memasukan fungsi atau kegiatan baru secara modern. Selain itu juga dapat merangsang kegiatan-kegiatan baru sehingga kawasan menjadi lebih aktif.

Sudah ada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang, hal itu seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama.

Salah satu amanat Perda No. 8 Tahun 2003 adalah perlu dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, untuk itu maka diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 646/7 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang 2011-2013 yang berisi oleh pakar-pakar konservasi cagar budaya, akademisi dan praktisi yang ada di Kota Semarang. Dengan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan konservasi Kawasan Kota Lama serta tugas BPK2L adalah mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kawasan Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi, pengawasan dan pengendalian Kawasan Kota Lama. Dalam pelaksanaannya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) ini dinilai kurang

berdampak bagi pembangunan kawasan kota lama Semarang. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah selanjutnya Melalui surat keputusan Walikota No 50/204/2016 Perubahan atas keputusan Walikota nomor 053/602/2013 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L).

Kota Lama Semarang merupakan tempat wisata yang memiliki julukan *Little Netherland*. Kawasan ini dinamai Kota Lama karena memang bangunan bangunan di wilayah tersebut memiliki gaya arsitektur zaman dulu. Luas kawasan kota Lama kurang lebih sekitar 31 hektar. Kawasan Kota Lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari dua abad. Kota Lama Semarang menjadi topik yang sering dibahas karena keunikannya yang menjadi *city branding* Kota Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Pada tahun 2020 Kota Lama Semarang diajukan sebagai *World Heritage UNESCO* sebagai situs warisan cagar budaya dunia.

Kawasan Kota Lama saat ini merupakan potret perkembangan dan transisi sejarah kota dan kebudayaan masyarakat setempat yang menjadi modal bagi pemerintah bagi pengembangan kota lama. Kota Lama Semarang, yang merupakan wilayah peninggalan Belanda, kental dengan kisah sejarah perkembangan kota Semarang dari masa ke masa. Maka, pengembangan Kawasan Kota Lama harus memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang tak bisa lepas dari sejarah perkembangannya dan melingkupi pembangunan berbagai sisi kehidupan, yang bisa diwariskan kepada generasi anak-cucu yang akan datang. Pentingnya revitalisasi dan pengembangan Kawasan Kota Lama Semarang dengan pencapaian SDGs *goal* kesebelas mengenai Pembangunan Kota dan Kehidupan Masyarakat secara berkelanjutan. Poin utama dari SDGs kesebelas adalah mewujudkan kota yang inklusif, aman, berkembang secara berkelanjutan, dengan komunitas yang memiliki daya *lenting*

yang tinggi (*inclusive town, resilient community, sustainable, and save city*). Salah satu bentuk dari terlaksananya suatu kebijakan publik yaitu dengan adanya implementasi kebijakan publik.

SDGs *goal* kesebelas yaitu *Sustainable Development Goals* Kesebelas mempunyai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara. Mengurangi ketidaksetaraan, kebijakan harus bersifat universal, memperhatikan kebutuhan populasi kurang beruntung dan terpinggirkan. Target dari SDGs *goal* kesebelas sebagai berikut:

- 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian

ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah

11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.

Sedangkan indikator SDGs *goal* kesebelas yaitu sebagai berikut:

11.1 Tingkat kemiskinan ekstrim.

11.2 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

11.2.a Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

11.3 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.

11.4 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

11.5 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

11.a Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

11.b Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.

11.c Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.

Implementasi kebijakan publik bukan tentang banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga disebabkan oleh suatu proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks. Menurut Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah

disalurkan untuk mencapai sasaran. Sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan publik maka perlu adanya konsolidasi jejaring kebijakan.

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang revitalisasi Kota Lama Semarang guna menjaga cagar budaya, mengembangkan berbagai destinasi wisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Semarang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sudah bisa dikatakan berhasil hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya renovasi berkelanjutan di Kota Lama Semarang telah menghasilkan banyak perubahan baik pada lingkungan maupun bangunannya. Perubahan tersebut berupa bangunan Kawasan Kota Lama Semarang yang dulunya banyak yang rusak terlihat kumuh karena terbengkalai sekarang sudah di sulap menjadi kawasan wisata yang mendatangkan banyak wisatawan dari wisatawan lokal sampai wisatawan manca negara. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada destinasi wisata merupakan langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga apabila tercipta lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran maka berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini disajikan beberapa bangunan cagar budaya yang terdapat di Kawasan Kota Lama Semarang berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yaitu:





Gedung Lyiod Tahun 2023



GBKI Kota Lama Semarang Tahun 2023



Gedung Pelni Tahun 2023



Gedung Oudetrapp Kawasan Kota Lama Semarang



Gedung MARBA Tahun 2023



Gedung 3D Museum Kota Lama Semarang Tahun 2023

Gambar 1.1
Bangunan Cagar Budaya di Kota Lama Semarang
Sumber: Hasil Observasi, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungan Situs Cagar Budaya, berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang mana bangunan-bangunan tersebut telah dilindungi oleh pemerintah Kota Semarang, dirawat serta dilestarikan karena merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang.

Berdasarkan Gambar 1.1 terdapat juga beberapa gedung yang ada di Kawasan Kota Lama yang bisa dikatakan kurang terawat dan tidak dilestarikan. Hal ini berarti kebijakan publik pemerintah daerah yang tertuang pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan isi peraturan daerah tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan Kota Lama Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 dikatakan belum sepenuhnya berhasil dilakukan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi juga merupakan salah satu permasalahan didalam Implementasi kebijakan Kawasan Kota Lama Semarang. Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan intervensi Kota Lama Semarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aji dan Subowo (2020) yang berjudul “Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang” hasil penelitiannya menyatakan bahwa Implementasi revitalisasi Kota Lama Semarang

memang sudah berhasil menjadikan Kawasan Kota Lama sebagai *city branding* dengan wajah barunya. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sistem birokrasi yang perlu diperhatikan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewantara (2017) yang berjudul “Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Semarang” hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang sudah cukup baik namun terkendala pada BPK2L yang sering melakukan perpindahan anggota, keberadaan kantor BPK2L yang kurang jelas, dan perlu digencarkan kembali sosialisasisosialisasi agar program ini tidak hanya tanggung jawab BPK2L melainkan masyarakat juga harus ikut serta dalam mencapai keberhasilan implementasi revitalisasi Kota Lama Semarang.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa terdapat cagar budaya berupa bangunan-bangunan yang kurang terawat dan tidak dilestarikan sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan implementasi kebijakan di Kawasan Kota Lama Semarang. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian yaitu “Analisis Implementasi Kebijakan Kota Lama Semarang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 untuk pengembangan dan penataan Kawasan Kota Lama Semarang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kawasan Kota Lama Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa pelaksanaan kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 untuk pengembangan dan penataan Kawasan Kota Lama Semarang.
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kawasan Kota Lama Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan secara umum mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kota Lama Semarang. Hasil penelitian ini tentu dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Kota Lama Semarang.

- b. Bagi Masyarakat Umum: Dapat mengetahui bagaimana kebijakan revitalisasi dan apa saja dampak positif dan negatif karena adanya implementasi kebijakan Kota Lama Semarang saat ini.
- c. Bagi Peneliti: Dapat dijadikan sebagai sebuah acuan untuk mahasiswa dalam menganalisis Kebijakan Kota Lama Semarang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu (*State Of The Art*)

Penelitian terdahulu merupakan sumber lampau dari hasil penelitian-penelitian yang kemudian akan digunakan peneliti sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu dapat meneliti serta melihat berbagai perbedaan atau persamaan yang ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti dapat mengembangkan atau memperbaiki penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian berikut ini:

Hasil Penelitian Agus Lukman Hakim (2019)

Penelitian Agus Lukman Hakim (2019), berjudul “Analisis Aktor yang Berperan dan Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Ruang: Studi di Kabupaten Pandeglang”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan alat analisis *stakeholder* dan *Content Analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis aktor yang berperan dan berpengaruh dalam implementasi Perda RT RW.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aktor yang berkepentingan dan berpengaruh adalah Bupati Pandeglang. Instansi yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam kebijakan tata ruang adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemukiman, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Komisi I

DPRD Pandeglang, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan aktor yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruhnya besar dalam kebijakan tata ruang di Pandeglang, yaitu Investor, Wartawan, LSM dikategorikan ke dalam *Contest Setter* (pendukung).

Hasil Penelitian Yitno Puguh Martomo (2020)

Penelitian Yitno Puguh Martomo (2020), yang berjudul “*Actor Networks Theory* Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Guna Mendukung Pariwisata Kota Surakarta”. Penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Jejaring Aktor (Michael Callon Bruno Latour dan John Law). Penelitian ini bertujuan untuk lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti, juga dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Walikota sebagai penanggung jawab wilayah berperan sebagai aktor utama berinisiatif bersama-sama dengan DPRD untuk memformulasikan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis. Beberapa aktor lainnya yang terlibat yaitu Dinas Sosial, Dunia Pariwisata, Dunia Usaha, Satpol PP, Bappeda, Rumah Rehabilitasi, Tokoh Masyarakat. Namun, pada Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Guna Mendukung Pariwisata Kota Surakarta berpotensi buruk seperti “macan ompong” artinya Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi manfaat bagi kepentingan publik akan tetapi juga berorientasi pada kepentingan suatu kelompok tertentu.

Implementasinya tidak ada penegakan sanksi sehingga berpotensi merugikan banyak pihak apabila tidak tertata dengan baik.

Hasil Penelitian Rikky Mulyawan, Enni Dwi Wahjunie, Iin Ichwandi, Suria

Darma Tarigan (2022)

Penelitian oleh Rikky Mulyawan, Enni Dwi Wahjunie, Iin Ichwandi, Suria Darma Tarigan yang berjudul “Kajian Peran *Stakeholder* Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh”. Penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder Mapping*, *Analisis Stakeholder*, dan *Analisis Implementasi Kebijakan* (Edward III). Penelitian ini diteliti dengan tujuan menganalisis PP, Qanun, *stakeholders* pengelola DAS *Krueng* Aceh dan implementasi kebijakan berdasarkan perubahan kondisi biofisik DAS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kondisi biofisik DAS, tutupan lahan DAS Krueng Aceh dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2020, perubahan ini berdampak pada kondisi hidrologi DAS dimana terjadi perubahan debit sungai maksimum pada tahun 2020 sebesar 15.78 m³/detik dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.09 m³/detik. Hal ini menunjukkan pengelolaan DAS yang belum berhasil, Terdapat 20 *stakeholders* yang terlibat pengelolaan DAS *Krueng* Aceh, pemerintah merupakan aktor utama yang berkepentingan tinggi dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Bila dilihat dari kondisi biofisik DAS tahun 2020 dan dikaitkan dengan peraturan perundangan, analisis *stakeholders*, serta analisis implementasi kebijakan dapat

dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan DAS secara terpadu belum berjalan sesuai isi kebijakan.

Hasil Penelitian Galang Adit Hutsa D (2017)

Penelitian Galang Adit Hutsa D (2017) yang berjudul “Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik (*Van Meter Van Horn*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai kawasan Pariwisata di Kota Semarang dan mengetahui hambatan dan faktor pendorongnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang sudah cukup baik namun terkendala pada BPK2L (Badan Pengurus Kota Lama Semarang). Hal ini menunjukkan bahwa peran aktor merupakan faktor pendukung atau penghambat suatu kebijakan.

Hasil Penelitian Salsabilla Alya Putri (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla Alya Putri (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Lama Semarang Sebagai *world Heritage Site Versi Unesco*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian dalam situs warisan dunia UNESCO.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa renovasi berkelanjutan di Kota Lama Semarang telah menghasilkan banyak perubahan baik pada lingkungan maupun pada bangunannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan revitaliasi yang diterapkan di Kota Lama

Semarang telah banyak membawa perubahan baik segi fisik maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan revitalisasi ini, Kota Lama Semarang kembali hidup dengan pemanfaatan bangunan-bangunan tak berpenghuni menjadi restoran, coffe shop, tempat penginapan. Namun, sayangnya belum semua bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang benar-benar dikembangkan dan dilestarikan.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004), administrasi publik adalah serangkaian proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Harbani Pasolong, administrasi publik adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1997), Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Dr. H. Amin Ibrahim (2008), Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Menurut John M. Pfiffner (1960), Administrasi Publik adalah upaya pelaksanaan kebijakan negara, dimana pelaksanaan kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh badan perwakilan politik yang mewakili masyarakat. Menurut Felix A. Nigro (1999), *Public Administration* adalah:

1. Usaha kelompok yang bersifat *cooperative* dilingkungan pemerintah.
2. Meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya.

3. Mempunyai peran penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politik.
4. Amat berbeda dengan administrasi privat.
5. Berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. Kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan publik.

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Berdasarkan penjelasan beberapa para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Yang mana didalamnya mencakup adanya kerja sama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang perananan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigm akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi publik. Dalam beberapa

literature Administrasi Publik dari dalam maupun luar negeri secara umum terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam Administrasi publik yaitu: *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Services* (NPS). Berikut ini dapat dijelaskan ke tiga paradigma yang berkembang dalam Administrasi Publik yaitu:

1. Old Public Administration (OPA)

Paradigma *administrasi public* dimulai dengan *Old Administration* atau administrasi publik lama. Paradigma Administrasi Negara Lama di kenal juga dengan sebutan Administrasi Negara Tradisional atau Klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara Woodrow Wilson dengan karyanya “*The Study of Administration*” (1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya “*Principles of Scientific Management*”.

The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden AS dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep *Old Public Administration* yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan professional. Administrasi Publik klasik dimulai ketika awal kelahiran dari administrasi public itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: dari perilaku

model klasik dan NPM ke *Good Governance*”. Pada masa perkembangan awal administrasi *public* dikenal dengan konsep yang sangat legalistic, dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hirarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi sangat sentralistik dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pemberian pelayanan *public*. Denhardt menguraikan karakteristik OPA yaitu:

- a. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah.
- b. Kebijakan *public* administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara yaitu tujuan yang bersifat politik.
- c. Pelayanan *public* harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik.
- d. Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik.
- e. Nilai pokok nya efisiensi dan rasionalitas.
- f. Sistem tertutup sehingga melibatkan warga negara dibatasi

2. New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood. NPM biasanya dikawankan dengan *Old Public Management* (OPM). Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an digunakan untuk melukiskan *sector public* di Inggris dan selandia baru. NPM menekankan ada *control* atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, penganalan pada dasar

kuasimekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. Asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen public dan birokrasi. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan *sector public* untuk diimplementasikan pengadministrasiannya.

Prinsip-Prinsip *New Public Management* yaitu:

- a. Penekanan pada keahlian manajemen professional dalam mengendalikan organisasi.
- b. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan.
- c. Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output.
- d. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik.
- e. Pengenalan masa kompetisi yang lebih besa dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi.
- f. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta.
- g. Penekanan pasa pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak sumber daya yang sedikit.

Karakteristik *New Public Management* meliputi:

- a. Manajemen professional disektor publik; secara bertahap mereka mulai menerapkan mengelola organisasi secara professional, memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas.
- b. Penekanan terhadap pengendalian output dan *outcome*; sudah dilakukan dengan penguunaan *performance budgeting* yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- c. Pemecahan unit-unit kerja di sector public, hal ini sudah dilakukan oleh Depkeu juga BPK yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon.
- d. Menciptakan persaingan disektor publik, seperti adanya mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi.
- e. Mengadopsi gaya manajemen dari sekor bisnis ke sektor publik seperti adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen Bea Cukai. Selain itu hubungan antara atasan dan bawahan semakin dinamis, gap senioritas dan muncul hal-hal profesionalisme yang dibutuhkan.
- f. Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya; dalam hal disiplin biaya, implementasi pada kedua instansi masih diragukan karena masih ada asetaset yang melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan dalam hal disiplin pegawai adanya modal presensi menggunakan *finger print* yang sudah sangat efektif dilakukan.

3. Pelayanan Publik Baru (*New Public Service*)

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet v. Dernhart dan Robert B. Dernhart berjudul “*The New Public Service*”. Paradigma NPS dimaksudkan untuk meng “*counter*” paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) yakni paradigma *New Public Managemen* yang dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigm *Old Public Administration*. Prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari pelayanan *public* baru (*new public service*), yaitu:

- a. Melayani warga negara bukan pelanggan (*Serves Citizens, Not Customer*) melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (*legitimate*) negara bukan pelanggan.
- b. Mengutamakan kepentingan publik (*seeks the public interest*) kepentingan public seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik.
- c. Kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*) kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada diatas segalanya.
- d. Berfikir strategis dan bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*) pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan *public*.
- e. Menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah (*recognize that accountability isn't simple*) pertanggung jawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat.
- f. Melayani dari pada mengarahkan (*serve rather than steer*) fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan

Cara pandang paradigma *New Public Service* ini, menurut Dernhart diilhami oleh:

- a. Teori politik demokrasi terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara dengan pemerintah.
- b. Pendekatan humanistic dalam teori organisasi dan manajemen. Dalam paradigma *New Public Service* ini lebih mengutamakan pelayanan publik

yang baik, yang lebih mengutamakan kepentingan publik. Paradigma ini menggunakan cara dengan berfikir strategis dan demokratis sehingga cenderung lebih menghargai individu daripada produktivitas.

4. Good Governance

Governance diartikan sebagai praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor yang tidak selalu mengambil keputusan. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good governance* diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Ciri-Ciri *Good Governance*:

- a. Mengutamakan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang termasuk dalam paradigma *New Public Management* (NPM) karena NPM menekankan ada *control* atas output kebijakan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, penganalan pada dasar

kuasimekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi *customer*. Paradigma ini cocok sebab sesuai dengan ciri-ciri implementasi kebijakan revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang.

1.5.4 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Kebijakan publik dalam prosesnya memerlukan sebuah tahapan yang kompleks karena menggunakan banyak sekali variable untuk mendukung kebijakan yang akan ditentukan, untuk itu banyak para ahli yang berkecimpung dalam dunia kebijakan melakukan sebuah kajian untuk menentukan cara tepat dalam melakukan proses kebijakan karena kebijakan publik memerlukan tahap-tahap dalam proses penyusunannya.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan Publik menurut William N Dunn (20013: 24). Ialah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Disini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Sebelumnya malah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula masalah karena alasan-alasan tertentu yang ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang tidak masuk kedalam agenda kebijakan kemudian ditulis oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang tadi didefinisikan kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor dapat bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tiadalah berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing.

5. Penilaian Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti a dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Jika Teori Grindle berbicara tentang isi kebijakan. Hal ini sedikit memiliki persamaan dengan Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang beranggapan bahwa karakteristik kebijakan merupakan salah satu pengaruh keberhasilan kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Berdasarkan kelima tahapan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai suatu kepentingan publik. Hal

ini dapat berupa aturan-aturan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada pemerintah. Terdapat berbagai macam faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan diantaranya seperti komunikasi para aktor, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya.

Tabel 1.5
Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan agenda	Para pihak yang berkepentingan menempatkan masalah pada agenda publik	Proses menyiapkan rancangan peraturan/ Perpu
Formulasi kebijakan	Merumuskan alternatif kebijakan	Pembuat keputusan menyadari akan perlunya perbaikan/ pembuatan kebijakan
Adopsi kebijakan	Proses pengadopsian kebijakan oleh pemerintah (pusat dan daerah)	Pemerintah mempertimbangkann untuk implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan	Pemerintah meyakini dan menerapkan kebijakan	Pemerintah bersedia menyediakan sumberdaya (manusia dan dana) untuk implementasi
Penilaian kebijakan	Proses penilaian apakah kebijakan dilaksanakan dan hasilnya sesuai tujuan	Masyarakat (kelompok sasaran) merasakan manfaat kebijakan

Sumber: James Mayers dan Stephen Bass (2004)

1.5.6 Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar ddapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti

setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implemendor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2016).

Inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka, diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu

implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

a. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Sabatier dan Mazmanian (1979) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutny pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama.

Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal. Enam syarat dimaksudkan adalah:

- 1) Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.
- 2) Teori kausal yang memadai, dan dapat memastikan untuk kebijakan itu mengandung suatu teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- 3) Struktur implementasi yang di susun secara legal supaya membantu pihak-pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
- 4) Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- 5) Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislative dan eksekutif.
- 6) Perubahan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak dapat meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Masmanian dan Zabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel Independen

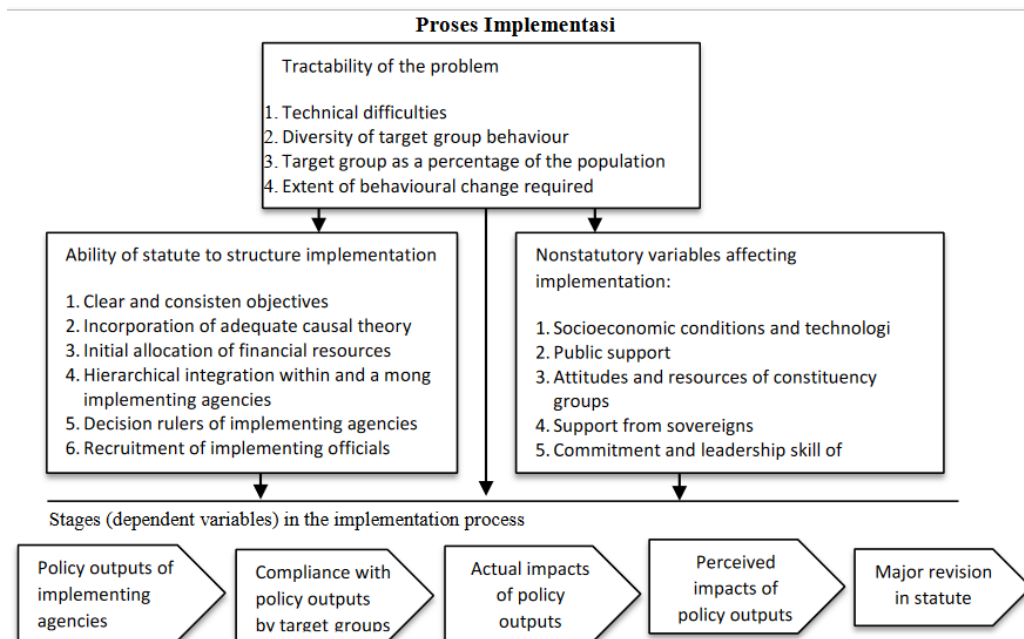
Mudah-tidaknya suatu masalah dapat dikendalikan yang berkenaan dengan suatu indikator masalah teori dan teknis dalam pelaksanaan, objek, keragaman dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

- 2) Variabel intervening

Diartikan sebagai suatu kemampuan dalam kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan. Sehingga dapat dipergunakan dengan teori kausal, sumber dana, ketepatan alokasi, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, prekrutan pejabat pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi sehingga berkenaan dengan indikator sosial-ekonomi dan teknologi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel dependen

Yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunya kebijakan pelaksana. Kedua, hasil yang nyata,. Ketiga, penerimaan atas hasil nyata Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar



Gambar 1.4 Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)

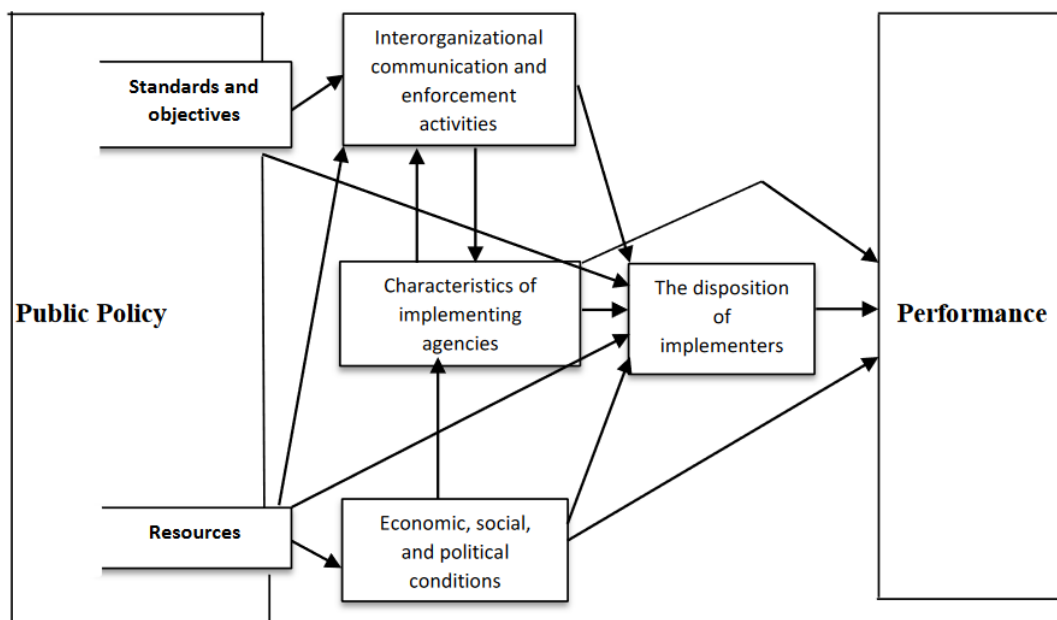
b. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter and Van Horn (1975), mendefenisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok- kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefenisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang

direalisasikan. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah:

- 1) Standard an tujuan (*standards and objectives*)
- 2) Sumber daya (keuangan) (*resources*)
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*)
- 4) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*)
- 5) Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*)
- 6) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (*economic, sosial and political conditions*)

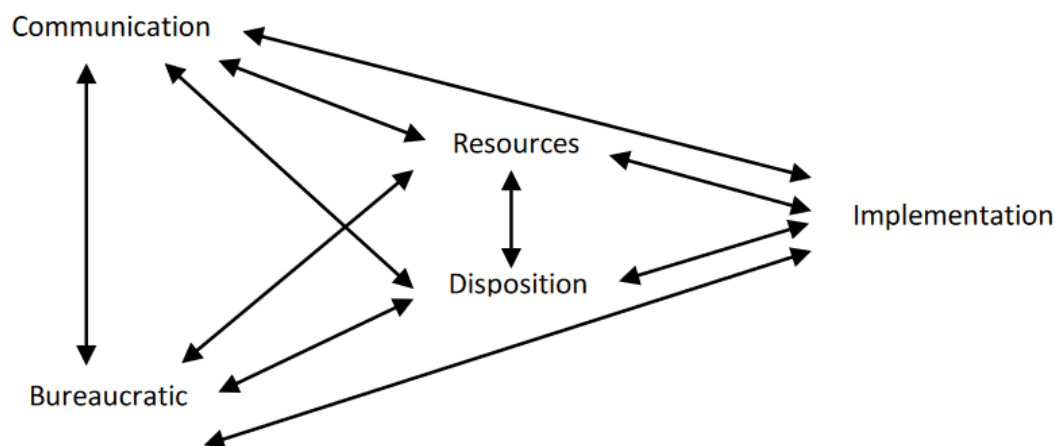


Gambar 1.5 Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah utama administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa *“without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully”*.

Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yang digambarkan dalam kerangka model implementasi sebagai berikut:



Gambar 1.6 Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para

implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*Resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Ke empat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (*membreakdown*) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap

implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1) Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga implementors dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkanluaskannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggungjawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan

merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan.

2) Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka Sumberdaya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen

sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan.

Informasi merupakan bagian sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. bukti lapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana lapangan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, Sumber daya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur/membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk

melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan

3) Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sud unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- b) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
- c) Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
- d) Vitalitas suatu organisasi
- e) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

1.5.7 Konsep Pelestarian

Pelestarian merupakan sebuah tindakan untuk membuat suatu obyek arkeologi agar obyek yang dimaksud tetap awet, aman, dan terpelihara sepanjang masa.

1.5.8 Konsep Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan bagian dari warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Bangunan, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan

Cagar Budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Perda No 2 Tahun 2020 Kota Semarang Pasal 1 Ayat 8)

1.5.9 Kebijakan Perda No 2 Tahun 2020 Kota Semarang

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 mengatur salah satunya tentang Pelestarian Bangunan Kawasan Kota Lama Semarang. Perda tersebut menyatakan bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata. Perda ini diterbitkan dengan alasan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang sehingga perlu ditinjau kembali. Pada perda No 2 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 10 tentang Cagar Budaya yang memiliki definisi Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Sedangkan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Perda No 2 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 1 berbunyi “ Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Situs Kota

Lama.”.Kebijakan pengelolaan Situs Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelindungan,. pengembangan; dan pemanfaatan. Kebijakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui strategi penerapan RTBL sebagai pedoman dalam penataan, penanganan permasalahan, pengendalian, pemanfaatan dan pelestarian bangunan dan lingkungan.

1.6 Fenomena Penelitian

Pada penelitian fenomena yang diamati yaitu tentang implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2020 tentang Kawasan Kota Lama Semarang serta bagaimana faktor yang mempengaruhi. Setelah dilakukannya survey lapangan di Kawasan Kota Lama Semarang sudah terlaksana buktinya saat ini Kawasan Kota Lama Semarang ditetapkan sebagai *Little Netherland* dan pada tahun 2020 ditetapkan sebagai *World Heritage* UNESCO sebagai situs warisan cagar budaya. Namun masih terdapat beberapa bangunan cagar budaya yang kurang terawat dan kurang dilestarikan sehingga hal itu belum sesuai dengan isi PERDA No 2 tahun 2020 tentang pengembangan dan penataan di Kawasan Kota Lama Semarang.

Berikut ini merupakan tabel fenomena penelitian :

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati Di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
1	Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Lama Semarang	Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi	1. Standar dan Sasaran kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana 4. Komunikasi 5. Lingkungan social, ekonomi, politik 6. Disposisi Implementor	Informan: 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang 3. Masyarakat Sekitar Kawasan Kota Lama Semarang 4. Pihak Swasta Yang Terlibat 5. Wisatawan Kota Lama Semarang
2	Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Lama Semarang	Faktor Pendukung dan Penghambat	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	

1.7 Argumen Penelitian

Kebijakan Publik di Indonesia tidak sepenuhnya berhasil terbukti dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan pelestarian bangunan Kota Lama Semarang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan Penelitian Suzanna Ratih Sari, Arnis Rochma Harani, Hermin Werdiningsi, yang berjudul “Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Kota Lama Sebagai Landasan Budaya Kota Semarang” hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelestarian kawasan Kota Lama Semarang mengalami hambatan karena kepemilikan lahan merupakan milik individu. Selain itu, berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang” yang ditulis oleh Bima Bayu Aji, Ari Subowo menyimpulkan bahwa Kebijakan Revitalisasi Kawasan Kota Lama

Semarang sudah berhasil menciptakan wajah baru .Wajah baru Kawasan Kota Lama Semarang yaitu mengalami revitalisasi besar dengan sedikit mengubah desain tanpa menghilangkan rasa asli dari arsitektur gaya Belanda pada kawasan Kota Lama Semarang artinya kebijakan revitalisasi ini sudah melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya namun masih ada beberapa kendala seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang masih perlu diperhatikan. Hal ini memperkuat pendapat penulis bahwa terdapat permasalahan didalam Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kota Lama Semarang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Upaya dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi (Pasolong, 2012:75). Desain ini digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan analisis kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang.

Ketika melakukan penelitian dibutuhkan penyelidikan secara hati-hati dan tepat. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode penelitian merupakan suatu teknik dalam memperoleh, mengumpulkan, mencatat data yang kemudian dianalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokokpokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2007:6) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Dengan kata lain penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pemaparan yang obyektif.

1.8.2 Situs Penelitian

Pemilihan suatu lokasi harus memenuhi beberapa syarat. Situs atau lokasi harus sesuai dengan substansi penelitian, karena lokasi dapat memberikan substansi permasalahan penelitian yang diteliti. Situs atau lokasi harus memberikan data yang cukup sehubungan dengan permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Kota Lama Semarang. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Kawasan Kota Lama Semarang yaitu tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang berada di kawasan tersebut. Situs penelitian yaitu seperti gedung Lyiod, gedung GBKI, gedung PELNI, gedung BPIB, gedung Oudetrap dan gedung MARBA.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti (Arikunto, 2006:145), Subjek penelitian adalah orang yang diminta suatu fakta atau opini dalam penelitian. Anton M. Moeliono (1993: 862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan pihak yang berperan serta mengenai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Lama Semarang.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan mempertimbangkan dana, waktu, tenaga dan ketelitian dalam menganalisis datanya. Sehingga penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria tertentu. Adapun yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus Kota Lama Semarang
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pengunjung Kota Lama Semarang
4. Masyarakat Domisili Kota Lama Semarang.
5. Sektor Swasta

1.9.4 Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, namun penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis permasalahan.

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka yang bisa dihitung kemudian dianalisis menggunakan metode dalam statistika atau rumus matematika.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Data kualitatif merupakan data yang bentuknya *non numerik* atau sulit untuk diubah ke dalam bentuk numerik. Biasanya data ini akan banyak digunakan untuk mengangkat fenomena sosial. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, observasi.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi, wawancara, dan kuisioner. Menurut Sugiyono (2018:45), sumber data adalah subjek di mana data bisa diperoleh baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung yang berasal dari sumbernya. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi, wawancara, dan kuisisioner. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen kebijakan, jawaban wawancara para subyek penelitian, kuisisioner dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Data primer penelitian ini meliputi jawaban para aktor yang terlibat.

2. Data Sekunder

Sumber data primer akan kurang lengkap apabila tidak ada penunjang data sekunder. Pengambilan sumber data sekunder penelitian ini berasal dari penelitian-penelitian terdahulu. Data ini bisa berasal dari sebuah artikel, *literature*, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini berupa data kemajuan kebijakan, data penilaian masyarakat tentang Kota Lama Semarang, atau penelitian-penelitian terdahulu terkait kebijakan Kota Lama Semarang.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Menurut Sugiyono

(2017, 194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi, studi kepustakaan, dan campuran.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis. Wawancara biasanya merupakan alat pengecekan kembali informasi informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Jenis *interview* meliputi *interview* bebas terpimpin (Sugiyono, 2008: 233). *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung baik formal maupun non formal dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian, terkait implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.

2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat langsung fakta di lapangan. Observasi ini dilakukan tanpa pertolongan bantuan lain. Penulis akan mengamati sesuatu terkait masalah penelitian dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti akan lebih mudah paham konteks data-data yang didapatkan.

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Dengan menggunakan metode observasi lapangan langsung, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana peran para aktor dalam implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. Manfaat dari observasi ini peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung.

3. Dokumentasi

Penelitian biasanya menggunakan sumber data berupa subyek (manusia) berbeda dengan teknik observasi dan wawancara, dokumentasi ini sumber datanya bukan berupa manusia melainkan berupa dokumen-dokumen, jurnal, karangan, majalah, surat kabar, dan pernyataan masyarakat yang disiarkan di media massa. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang peran para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang.

4. Studi Kepustakaan

Metode ini artinya dengan mendatangi perpustakaan dan mencari buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat, dan informasi yang didapat

digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teknik studi kepustakaan artinya peneliti akan meneliti dengan cara mencari sumber-sumber data terutama di perpustakaan. Data dapat berupa penelitian-penelitian terdahulu, pada zaman modern ini, peneliti juga dapat mencari sumber data penelitian terdahulu melalui media internet seperti penelitian-penelitian terdahulu terkait implementasi kebijakan pelestarian bangunan cagar budaya Kota Lama Semarang. Selain itu penulis dapat mencari sumber data penelitian terkait aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data menurut Moleong (2003:103) merupakan proses mengorganisasikan data, mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan sehingga memperoleh informasi yang mendalam tentang obyek-obyek yang akan diteliti. Dalam menarik kesimpulan, peneliti memerlukan data-data yang telah dianalisis. Proses penyusunan kriteria data yang dikumpulkan menjadi sebuah gambaran umum sebagai obyek penelitian. Tahapan-tahapan analisa data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data artinya mereduksi serta memberikan rangkuman terhadap data-data yang diteliti. Setelah data telah direduksi dengan baik tentu akan memudahkan peneliti mengambil sebuah gambaran mengenai penelitian.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian atau laporan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan artinya pemaknaan atas benda-benda keteraturanketeraturan pola-pola, penjas dan alur sebab akibat pada penyajian data. Penarikan kesimpulan juga dilakukan dengan meninjau ulang pada catatan lapangan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter subyektif.

1.8.8 Kualitas Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Menurut Sugiyono (2018:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada untuk memeriksa kebenaran atau validitas sebuah data yang didapatkan. Sehingga dapat memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan metode dan kemudian membandingkan hasil data yang diperolehnya. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan perolehan data dari hasil wawancara pendapat dan perspektif narasumber dengan informasi-informasi yang didapat peneliti.